

KENDALA PERKEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT — Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna, Kota Palu — (Constraints to The Developmental of Societal Potential: Case Study in Kawatuna, Palu City)

Achmadi JAYAPUTRA

Abstract The impact of uncoordinated handling of social-economic problems in community is the occurrence of constrains for the development of societal potential. In enerally, is assumed that the causes of poverty can be come from internal factors such as the limited education and skill based on local potentials, Whereas the external factors causing povertyare less pro-poor of the government policy disaster, This research is aimed at identifying poverty programs and it's constraints focusing on the development of societal potential. The respondents of this research are local readers and managers of local institutions at Kelurahan Kawatuna district of Palu Selatan, The City of Palu. Result of this research found that constraints for the development of societal potential are economic problems and the lack of human resources. These factors seem to have reduced the effectiveness of empowering natural and social resources.

Key Words: People centered development, Focus group discussion

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan yang dialami masyarakat selalu menjadi perhatian secara individu atau kelompok untuk memikirkan pemecahan masalahnya. Disebut sebagai suatu masalah karena dialami sebagian besar masyarakatnya yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Keberadaan masyarakat miskin dapat terjadi di sebagian kecil penduduk perkotaan atau sebagian besar penduduk di perdesaan. Di lingkungan masyarakat miskin sebenarnya ada potensi yang dapat dikembangkan untuk menanggulangi permasalahan mereka sendiri. Kondisi

demikian berakibat tidak atau kurang terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan sosial warga masyarakat.

Pembangunan dalam menghapus kemiskinan, keterlibatan masyarakat sebagai penyandang masalah sangat diperlukan mulai dari perencanaan program sampai pada pelaksanaan program. Oleh karena itu model atau pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*People centered development*) perlu dikembangkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Pendekatan pembangunan tersebut berorientasi pada gerakan pembangunan yang bersumber dari masyarakat dan dilakukan sendiri oleh

warga masyarakat. Strategi penanggulangan kemiskinan yang dianggap ideal adalah pemberdayaan masyarakat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta memperkuat martabat manusia dan bangsa. Sebagai upaya mencapai pelaksanaan model atau pendekatan tersebut, masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri setiap individu dan potensi masyarakat di lingkungannya menjadi sumber kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

Menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan menurut Komisi Penanggulangan Kemiskinan (2003) dapat ditempuh strategi-strategi yang meliputi: a) Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan kesempatan berusaha; b) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin agar lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik serta mengontrol yang menyangkut kepentingan, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah kebutuhannya; c) Peningkatan kapasitas dan potensi masyarakat miskin agar mampu bekerja dan berusaha secara produktif; dan d) Jaminan/perlindungan dari bencana alam, bencana sosial.

Kenyataannya penanggulangan kemiskinan kurang memperhatikan kondisi kemiskinan lokal yang ditentukan oleh komunitas atau pemerintah setempat. Di suatu wilayah terdapat masyarakat atau komunitas yang belum mampu menggali dan mengembangkan sendiri potensi sosialnya. Demikian juga potensi sosial

masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara optimal. Akibatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan warganya sedikit tertinggal dari masyarakat sekitarnya. Melihat kondisi yang ada saat ini beberapa pengamat dan pemerhati atau pakar menganggap bahwa pada kenyataannya pelaksanaan program-program pembangunan yang mengarah pada pengembangan potensi sosial masyarakat masih dihadapkan pada berbagai masalah seperti: a) Kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat belum berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin; b) Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan sumber-sumber yang ada di daerah setempat atau lokal; c) Masyarakat kurang (*self awareness*) memiliki program-program yang dilaksanakan dan keterbatasan pendidikan dan pengetahuan warga masyarakat, sehingga mempengaruhi wawasan masyarakat dalam menerima perubahan dalam segala hal.

1.2 Permasalahan dan Tujuan

Penanganan kemiskinan yang dianggap ideal saat ini adalah melalui pendekatan yang menekankan keberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ini dilakukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sosial dan alam yang ada di lingkungan setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan pada penelitian ini dirumuskan yaitu: a) Apa saja program-program yang telah dilaksanakan

masyarakat sebagai upaya pemberdayaan potensi sosial masyarakat ?, dan b) Apa saja faktor-faktor yang menghambat perkembangan potensi sosial masyarakat ?

Tujuan penelitian ini yaitu; a) Mengidentifikasi potensi-potensi sosial masyarakat miskin; b) Mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan potensi sosial masyarakat miskin yang pernah dilaksanakan di lokasi penelitian; c) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan potensi sosial masyarakat miskin.

1.3 Metodologi

Penelitian ini bersifat *deskriptif* sebagai upaya mengidentifikasi dan menguraikan tentang potensi-potensi sosial yang ada dan dimiliki masyarakat miskin di lokasi penelitian. Sasaran penelitian; pertama, sasaran lokasi; dipilih secara *purposive* dengan kriteria adanya masyarakat miskin atau tertinggal yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a) Lembaga-lembaga masyarakat di bidang sosial dan ekonomi belum optimal atau berkembang; b) Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani atau buruh industri atau pedagang kecil; c) Sebagian besar dari jumlah penduduk desa atau kelurahan tersebut terkategori miskin menurut standard setempat; d) Ada akses sarana transportasi umum ke perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lokasi terpilih dan ditetapkan Kota Palu. Daerah ini dipilih sebagai langkah awal dalam memperhatikan faktor-faktor peng-hambat yang dialami masyarakat kota. Kemudian dipilih Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Palu

Selatan yang mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sasaran Responden penelitian dipilih secara acak berdasarkan kriteria yang terdiri dari: a) Masyarakat miskin; b) Tokoh masyarakat seperti Kepala Kelurahan, pemuka agama, pemuka adat yang ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan, sebanyak lima orang; c) Pengurus Orsos/LSM yang aktif melakukan kegiatan penanganan kemiskinan, sebanyak tiga orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu; a) Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan berbagai instansi dan pihak yang terkait dalam program penanganan kemiskinan; b) Wawancara mendalam dengan masyarakat miskin dan instansi terkait; c) Observasi terhadap lingkungan masyarakat lokal miskin; d) Studi dokumentasi data yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat miskin yang sudah pernah dilaksanakan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengembangkan potensi masyarakat.

2. KERANGKA KONSEP

Masyarakat memiliki fungsi amat penting bagi setiap individu. Individu lahir dan berkembang sebagai atau

menjadi manusia dalam masyarakat. Masyarakat mengembangkan lembaga-lembaga sosial untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan warganya sekaligus untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam sosiologi dikenal lembaga utama pada setiap masyarakat, yaitu keluarga, perekonomian, keagamaan, pemerintahan dan pendidikan. Lembaga tersebut masing-masing memiliki fungsi mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan khusus. Sebagai contoh lembaga keluarga berfungsi sebagai sarana yang diakui sah untuk melahirkan anak, memenuhi kebutuhan seksual, kasih sayang dan lain-lain. Dalam masyarakat yang sudah maju muncul dan berkembang banyak lembaga-lembaga spesifik untuk mengatur tingkah laku warganya dalam memenuhi kebutuhan spesifik tertentu.

Ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial aneka macam lembaga sosial tersebut dipandang sebagai sumber kesejahteraan sosial kemasyarakatan (Alan Pincus dan Ane Minahan; 1973). Sumber kesejahteraan sosial dalam usaha kesejahteraan sosial memiliki kedudukan yang amat penting. Menurut Max Sipiron (1975) sumber kesejahteraan sosial berfungsi sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan, pertumbuhan pribadi, kelompok, adaptasi, pemecahan masalah dan alat untuk mencapai kesejahteraan. Adapun yang dimaksud sumber kesejahteraan sosial adalah setiap hal yang berharga, sesuatu yang berada dalam simpanan atau telah tersedia, yang dapat digali dan digunakan orang sebagai alat sehingga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah.

Berdasarkan pengertian ini sumber kesejahteraan sosial meliputi aspek yang

amat luas, baik yang melekat pada diri seseorang maupun pada masyarakat dan kekayaan alam yang dimiliki atau ada dilingkungannya. Sumber dapat dikelompokkan menurut berbagai kategori, seperti : menurut asalnya (*internal-external*); sifat (konkrit-simbolik atau abstrak). Sumber Kesejahteraan Sosial (SKS) yang melekat pada diri pribadi individu masyarakat (*internal*) seperti: kecerdasan, kreativitas, motivasi, stamina, kemampuan khas dan lain-lain. Sumber yang berada di luar pribadi (*external*) seperti: harta, bumi dan hasilnya, mata pencaharian, kerabat, tetangga, hak pensiun dan lain-lain. Sumber yang bersifat konkrit meliputi: bumi dan hasilnya, sementara cinta dan status adalah merupakan sumber simbolik.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, potensi adalah *kesanggupan, kekuatan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan*. Potensi sosial merupakan *kesanggupan, kekuatan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan diri pada pelaksanaan proses pembangunan*. Hakekat potensi-potensi sebagaimana tersebut diorientasikan pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada dasarnya adalah semua hal berharga yang berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alami yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat Usaha Kesejahteraan Sosial (Pusdatin; 1999).

Kurangnya keseimbangan pada berbagai aspek dalam pelaksanaan pembangunan dan tidak dapat dipungkiri menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya pengangguran dan

keterbelakangan, sehingga mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki masyarakat dan lingkungannya kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak dalam proses pembangunan. Pada umumnya masyarakat miskin memiliki kekurangan-mampuan dalam berusaha dan memiliki keterbatasan dalam mengakses sarana dan prasarana ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki potensi lebih tinggi.

Pada dasarnya kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu *kemiskinan absolut* dan *kemiskinan relatif*. *Kemiskinan absolut* "adalah kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan artinya jumlah pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang tercermin oleh garis kemiskinan absolut." Sebagaimana estimasi BPS untuk tahun 2002 batas garis kemiskinan adalah rata-rata pengeluaran minimum Rp.130.499,- per kapita per bulan di daerah perkotaan dan Rp. 96.512,- di daerah pedesaan. *Kemiskinan relatif* adalah *kemiskinan yang diukur dari ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok dalam masyarakat*.

Secara umum penyebab kemiskinan dapat dipilah sebagai berikut; taraf pendidikan masyarakat rendah, sehingga mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya kesempatan dan lapangan kerja yang dapat dimasuki; taraf kesehatan masih rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa; terbatasnya lapangan kerja atau kegiatan usaha yang sesuai dengan

kondisi pendidikan dan kesehatan rendah; kondisi terisolir yaitu banyaknya penduduk miskin yang terisolir dan sulit terjangkau.

Kemiskinan di Indonesia mempunyai empat dimensi pokok yakni; (1) kurangnya kesempatan; (2) rendahnya kemampuan; (3) kurangnya jaminan (4) ketidakberdayaan. Adapun kemiskinan lazim diukur dengan garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Konsep masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal: (1) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; (2) melakukan kegiatan usaha produktif; (3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi; (4) menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan, kecurigaan, sikap apatis dan fatalistik; dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan tersebut menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan untuk berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Ciri-ciri kemiskinan (Soulisa Awat, dkk; 1996): *pertama*, kemiskinan ditandai dengan rumah dibuat dari bahan bangunan bermutu rendah, ekonomi sederhana, cenderung menghabiskan penghasilan yang diperoleh. *kedua*, fisik yang lemah disebabkan ketergantungan

yang tinggi terhadap ekonomi. Pemenuhan gizi menjadi kurang dan rawan penyakit; ketiga kerentanan keluarga miskin biasanya tidak mempunyai cadangan dana untuk menghadapi keadaan darurat; *keempat*, terisolasi secara geografis kurang mendapat kemudahan dalam berbagai aspek dan kurang bergaul dengan masyarakat lain; *kelima* ketidakberdayaan dalam menghadapi kehidupan atau gangguan pihak lain. Khusus Sulawesi Tengah memiliki ciri yang sama atau banyak kesamaan antara penduduk pantai dan pegunungan. Hal ini berkenaan dengan kondisi masyarakat yang belum mempunyai pendapatan berlebih.

Konsep potensi sosial sebagaimana terurai tersebut diarahkan pada keberfungsian aspek keorganisasian atau kelembagaan; ketenagaan atau sumber daya manusia; dana dan nilai-nilai kemasyarakatan. Potensi yang ada dalam masyarakat sebagaimana tersebut diasumsikan akan dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat apabila aspek-aspek tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, masih terdapat keterbatasan bukan saja modal tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Di samping itu juga terbelenggu adat dan kebiasaan yang terkadang kurang menguntungkan dalam kepentingan pembangunan. Sebagian masyarakat belum menyadari potensi yang dimiliki sehingga lebih banyak bergantung pada masyarakat sekitarnya.

3. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

3.1 Kondisi Geografi

Kelurahan Kawatuna luas wilayahnya sekitar 20,67 Km². Jika diperhatikan secara geografis letak wilayah Kelurahan Kawatuna dibatasi bagian Timur dengan Kecamatan Palu Timur, bagian Selatan dengan Kabupaten Donggala, bagian Barat dengan Desa Petobo. Kelurahan Kawatuna termasuk kategori daerah swakarya, wilayah ini terbagi dalam dua lingkungan, empat RW dan sembilan RT. Jarak antara ibu kota kecamatan dengan kelurahan yaitu empat kilometer yang dapat ditempuh dengan semua jenis angkutan darat.

Keadaan geologi Kota Palu bagian selatan terdiri dari jenis tanah alluvial yang berada di lembah Palu yang menunjukkan bahwa formasi geologinya terdiri dari bantuan gunung berapi, batuan terobosan yang tidak membeku, batuan-batuan metamorfosis dan sedimen. Dataran lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Di Kelurahan Kawatuna keadaan tanahnya menurut persentase permukaan tanah yaitu separuhnya 50% berupa dataran, 25% perbukitan, 25% pegunungan, dan ketinggian dari permukaan laut sekitar 180 M.

3.2 Kondisi Demografi

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kota Palu selama 10 tahun terakhir rata-rata 3,15 % pertahun atau dari 199,445 jiwa menjadi 269.083 jiwa pada tahun 2000. Sementara itu jumlah penduduk hasil registrasi pada tahun

2002 tercatat 278.368 jiwa. Hingga akhir tahun 2002 kepadatan penduduk tercatat 705 jiwa/Km², dengan luas wilayah Kota Palu 395,06 Km². Bila dilihat penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Palu Selatan merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi yaitu 1.590 jiwa/Km², sedangkan Kecamatan Palu Timur merupakan wilayah yang terjarang penduduknya yaitu sebanyak 360 jiwa/Km². Kelurahan Kawatuna jumlah penduduknya sebanyak 2.511 jiwa (589 KK) dengan kepadatan penduduknya rata-rata 121 jiwa/Km², mereka terdiri dari 1.215 orang laki-laki dan 1.296 orang perempuan (BPS; 2002a).

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya yaitu sebagian besar 62,29 % bekerja di sektor pertanian, 25,93 % bidang jasa seperti ojek, sopir, 3,7 % pertambangan atau penggalian, dan 0,17 % di sektor industri dan kerajinan, 2,36 % perdagangan, 1,68 % angkutan, dan 3,37 % peternakan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerjanya sebanyak 1.272 orang, dari jumlah tersebut yang belum bekerja dilihat dari tamatan sekolah SD sebanyak 42 orang (3,30%), SLTP sebanyak 47 orang (3,69%), SLTA sebanyak 41 orang (3,22%), Diploma sebanyak 14 orang (1,10 %) dan Perguruan Tinggi 11 orang (0,86%). Dari jumlah tersebut yang sudah bekerja sebanyak 1.117 orang dan yang belum mendapat pekerjaan sebanyak 155 orang.

4. POTENSI SOSIAL MASYARAKAT

4.1 Sumber Daya Alam

Memperhatikan kondisi alam yang demikian sebagian (62,29 %) masyarakat Kelurahan Kawatuna banyak yang bekerja di sektor pertanian yang mendukung perekonomian dan dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Didukung pengairan untuk 10 Ha bersumber dari irigasi sederhana dan 32 Ha sawah tadah hujan. Produksi hasil pertanian di Kawatuna yaitu padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan ubi jalar.

Luas tanaman perkebunan di Kawatuna yaitu kelapa 4 Ha setahun menghasilkan 11,52 Ton dan coklat 4,5Ha dengan produksi 1,92 Ton. Memperhatikan lahan tanah kering di Kawatuna, menurut jenis penggunaannya dapat dikelompokkan untuk bangunan 4,39 Ha (0,22%), Kebun 378Ha (18,67 %), Rumput 1.501,61 Ha (74,15 %), tidak diusahakan 15 Ha (0,74%), kayu-kayuan 110 Ha (5,43 %) dan lainnya 15 Ha (0,74 %).

Masyarakat Kelurahan Kawatuna disamping bekerja di sektor petanian juga beternak antara lain sapi, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras dan itik.

4.2 Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Kawatuna yang telah menamatkan tercatat Sekolah Dasar sebanyak 793 orang (43,24 %), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 504 orang (27,48 %), Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas sebanyak 306 orang (16,68 %), Diploma 35 orang (1,91 %), dan Perguruan Tinggi 41 orang (2,24 %). Sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan mengurangi kebodohan. Jumlah bangunan sekolah yang layak pakai yaitu SD sebanyak 3 buah, satu SLTP dan satu SLTA. Ternyata tingkat pendidikan mereka masih relatif rendah.

Masih banyak remaja yang putus sekolah yaitu sebanyak 81 orang terdiri dari putus sekolah SD sebanyak 33 orang, SLTP sebanyak 25 orang, SLTA sebanyak 16 orang dan yang kuliah sebanyak tujuh orang. Masyarakat di Kelurahan Kawatuna pada umumnya memiliki keterampilan menjahit, membuat kue, bertani, beternak, berdagang dan pertukangan.

Sarana kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kematian. Sarana kesehatan yang terdapat di Kelurahan Kawatuna yaitu Puskesmas 1 buah, Puskesmas Pembantu 1 buah, Pos Keluarga Berencana 1 buah, Posyandu 5 buah, Dokter 2 orang, Perawat 7 orang, Mantri Kesehatan 3 orang, Bidan Kelurahan 2 orang, dan Dukun terlatih 9 orang.

4.3 Sumber Daya Sosial

Sarana perekonomian sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Jumlah sarana ekonomi yang ada yaitu kios sebanyak 15 buah, wartel 1 buah dan pasar mingguan Lasoani yang dikunjungi tiga kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu. Lembaga ekonomi yang ada Koperasi Unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat.

Lembaga Kemasyarakatan ada yang dibentuk pemerintah dan ada bentukan masyarakat. **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)** merupakan suatu organisasi yang memberi pembinaan bagi ibu-ibu. Anggotanya dibagi dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja) dengan kegiatannya; arisan, memberikan keterampilan kepada anggotanya, bakti sosial dan sebagainya. **Karang Taruna** merupakan wadah untuk membina pemuda dalam mengembangkan kreativitasnya. Kegiatannya antara lain olah raga, kesenian, rekreasi, bakti sosial dan usaha kesejahteraan sosial. **Paguyuban** dari asal usul penduduk yang berkenaan dengan urusan adat istiadat masing-masing. **Kelompok pengajian** yang dibentuk di kelurahan Kawatuna yaitu kelompok bapak-bapak dilaksanakan seminggu sekali, demikian juga dengan kelompok pengajian ibu-ibu. **Kelompok Remaja Masjid** dibentuk untuk memberi pembinaan mengenai budi pekerti, keimanan kepada Allah dan lain-lain. Tempat ibadah yaitu tiga Masjid dan satu Mushola.

Lembaga Adat yang terdapat di Kawatuna yaitu Dewan Adat. Lembaga ini sudah ada sejak dulu dan sifatnya turun temurun. Struktur organisasi lembaga ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Anggotanya sebanyak 10 orang yang terdiri dari perwakilan tiap RW. Perwakilan berperan sebagai penyelesaian perselisihan, tetapi jika tidak dapat diselesaikan maka diserahkan pada Dewan Adat. Fungsi lembaga ini yaitu mengatur dan mengarahkan masyarakat yang berkaitan dengan sosial budaya yang telah disepakati bersama. Kegiatan Dewan Adat antara lain mengatur pesta panen raya, mengurus pesta adat,

musyawarah adat, memutuskan perkawinan warga masyarakat dan mendamaikan perselisihan antar warga.

5. PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA

5.1 Permasalahan

Berdasarkan data yang diterbitkan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (2004; 1) tahun 2003 dengan jumlah penduduk sekitar 2.242.914 jiwa, yang dikategorikan miskin berjumlah 509.100 jiwa (23,03 %). Mereka tersebar dalam sembilan wilayah kabupaten/kota yang ada, dengan penghasilan rata-rata Rp.117.284,- per bulan. Prosentase termiskin berada di Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk miskin mencapai 98.800 jiwa, tetapi penghasilan rata-rata sebesar Rp.115.647,- per bulan. Penghasilan terendah di Kabupaten Banggai sebesar Rp.93.995,- per bulan, namun jumlah penduduknya yang miskin mencapai 51.900 jiwa (18,44 %). Khusus di Kota Palu yang paling sedikit jumlahnya yaitu mencapai 26.900 jiwa (9,67 %) dengan ukuran batas garis kemiskinan berpenghasilan Rp 118.510,- per bulan. Dibandingkan dengan jumlah pengeluaran rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kota Palu melebihi pengeluaran secara umum. Perbandingan tersebut erat kaitannya dengan kondisi Kota Palu yang merupakan ibukota provinsi.

Permasalahan yang dirasakan masyarakat saat ini terbagi dua yaitu besarnya jumlah keluarga miskin dan tingginya angka pengangguran. Kemiskinan merupakan akibat dari

kurangnya distribusi pendapatan masyarakat, sehingga ada masyarakat yang memperoleh penghasilan tinggi. Sementara masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah atau belum memenuhi taraf kehidupan yang layak. Angka pengangguran telah menyebabkan banyak usia kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, mereka mengalami masalah tidak tersedianya peluang kerja yang cukup menampung tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Padahal banyak yang sudah mempunyai keterampilan kerja atau sumber daya manusia yang terbentuk dalam bidang pendidikan menengah dan tinggi.

Permasalahan tersebut disebabkan karena tiga faktor yaitu natural, kultural dan struktural. *Faktor natural* terlihat dari perbedaan geografis. Secara geografis seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dua yaitu pegunungan dan pantai. Pegunungan merupakan bagian tengah dari daerah Palu dan Poso di bagian pedalaman, serta bagian utara yang berada dalam wilayah Buol Toli-toli yang merupakan daerah pemukiman bagi pedalaman. Daerah pantai berada di bagian timur dan barat wilayah provinsi tersebut, sehingga semua kabupaten dan kota memiliki kedua jenis geografis tersebut. Bentuk geografis demikian juga menyebabkan kemiskinan karena hanya sedikit bagian daratan yang dapat ditanami jenis tanaman tertentu seperti kelapa dan coklat. Sedangkan daerah pantai atau kepulauan hanya bertumpu pada hasil laut yang diolah secara sederhana.

Faktor budaya atau kultural terdiri dari banyaknya suku bangsa yang menimbulkan perbedaan adat istiadat masing-masing. Diketahui penduduk

provinsi ini terdiri dari penduduk setempat dan penduduk pendatang. Penduduk setempat yang masih banyak terdiri dari suku bangsa Donggala, Banggai, Buol, Kulawi, Tajio, Poso dan sebagainya tinggal sesuai dengan wilayah geografis yaitu tinggal di pegunungan dan di bagian pantai atau kepulauan. Mereka masih memelihara adat istiadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan belum menunjukkan perubahan atau kemajuan yang berarti. Kehidupannya masih mempertahankan tradisi lama, hidup dalam komunitas dan cara hidup yang masih sederhana seperti mencari makan hari ini untuk hari ini dan hari esok akan dicari sesuai dengan keperluan.

Dilihat secara budaya penduduk setempat dengan penduduk pendatang dapat dibedakan misalnya dalam ruang lingkup jenis pekerjaan dan cara kerja masing-masing. Ini berkenaan dengan etos kerja, misalnya penduduk setempat kebanyakan sebagai petani dan nelayan yang mempunyai etos kerja disesuaikan dengan kondisi alam seperti prinsip hidup hari ini untuk hari ini dan hari esok akan dicari. Berbeda dengan penduduk pendatang yang terdiri dari pedagang. Etos kerjanya terus menerus berusaha untuk mencari kehidupan dan tambahan baru. Dapat dikatakan penduduk pendatang lebih banyak tantangannya dan terlihat lebih mendominasi kehidupan ekonomi di perdagangan dan usaha swasta.

Faktor struktural yang merupakan cakupan antara kehidupan manusia dengan kebijakan yang dihadapi. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi dari jenis pekerjaan yang dilakukan seperti petani dan nelayan hanya

mengandalkan lingkungan alamnya dari sektor pertanian. Petani kelapa atau coklat menjual seluruh hasilnya kepada pedagang antar pulau, jika dilihat dari harga jual memang cukup tinggi karena hasil pertaniannya sebagai komoditas ekspor. Penghasilan yang diperoleh tidak seimbang dengan pengeluaran keluarga karena harga-harga bahan pokok cukup mahal. Semua bahan pokok atau sembilan bahan pokok didatangkan dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Wajar kalau harganya juga tinggi, sehingga tidak diimbangi dengan produk andalan tersebut di atas.

Hanya kelompok masyarakat tertentu yang dapat menikmati keuntungan seperti pengusaha kopra, coklat dan pemilik usaha perikanan. Mereka memanfaatkan modal dan alam setempat yang sesuai dengan jenis usaha dan mengembangkannya sebagai komoditas ekspor. Seluruh hasil usahanya ditambah lagi dengan pembelian dari petani lokal di jual ke luar negeri atau ke Pulau Jawa. Sementara masyarakat membeli kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan lainnya yang kebanyakan didatangkan dari luar Sulawesi Tengah. Keadaan tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah setempat karena belum bisa mengandalkan hasil pertanian atau hasil lainnya untuk menanggulangi ekonomi masyarakat. Belum muncul upaya untuk ke arah tersebut, karena beberapa produk andalan seperti sayuran dan ikan harganya cukup mahal. Bagi penduduk setempat tertentu yang tidak mempunyai penghasilan cukup dan daya beli rendah akan mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Permasalahan sosial daerah miskin dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. *Segi ekonomi* berdampak pada kualitas hidup, masyarakat tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak. Tersisih dari kehidupan sosial yang berpengaruh terhadap lingkungan dan pendapatan keluarga. *Segi kesehatan*, terlihat dari gizi yang buruk dan tingginya angka penderita sakit. Pengobatan yang dilakukan lebih banyak secara tradisional, yang masih percaya terhadap pengobatan desa melalui bantuan dukun. Pengobatan melalui dukun dianggap lebih murah dan kadang-kadang tidak bayar, sehingga masih banyak yang pergi berobat secara berkala. Pengobatan medis baru dilakukan, apabila orang yang bersangkutan mengalami sakit parah dan perlu dirujuk ke rumah sakit.

Sedangkan *segi pendidikan* berkaitan dengan rendahnya sumber daya manusia seperti banyaknya anak putus sekolah dalam tiap tingkatan pendidikan, meningkatnya jumlah pengangguran, timbulnya kenakalan remaja dan keluarga. Masalah sosial lainnya berkaitan dengan makin banyak keluarga tidak mampu, anak terlantar dan kecacatan. Ini semuanya berkaitan dengan segi-segi yang telah disebutkan di atas.

5.2 Penanganan

Secara garis besar terbagi dua kelompok yaitu program yang bersifat penyelamatan (*rescue and crash programe*) dan program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Jenis program penyelamatan ditujukan kepada kelompok miskin dengan sasaran masyarakat miskin yang

diharapkan dapat mandiri. Jenis program tersebut antara lain melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pendidikan, Operasi Beras, Kesehatan dan Pertanian.

Program yang bersifat pemberdayaan dengan maksud memberdayakan kelompok masyarakat yang sudah ada, kelompok ini diseleksi dan secara langsung dapat merubah status garis kemiskinan yang selama ini disandangnya. Jenis pemberdayaan usaha tersebut seperti kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bantuan terhadap Kelompok Masyarakat (Pokmas) berbagai usaha, pengembangan ekonomi keluarga dengan pemberian modal usaha, Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra) dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra). Penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial dan masyarakat.

Penanganan yang dilakukan instansi pemerintah. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palu, menitik beratkan pada landasan masyarakat yang meliputi aspek pengembangan dalam arti penggalan dan pembinaan potensi masyarakat, serta rehabilitasi penyandang masalah sosial. Strategi dan sasaran diarahkan pada; pertama, semakin mantapnya kesetiakawanan sosial; kedua, tumbuhnya pilar-pilar partisipan masyarakat; ketiga, terselenggaranya usaha kesejahteraan sosial menurut sistem pelayanan berjenjang.

Pemecahan masalah yang muncul tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam yang

sangat mendukung dalam usaha ekonomis produktif. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan lahan pertanian yang belum digarap untuk tanaman palawija seperti bawang dan kacang-kacangan. Hasilnya dapat menjadi andalan masyarakat karena laku dan cepat dijual, misalnya melalui Kelompok Binaan Sosial Fakir Miskin (KBSFM) dan Keluarga Muda Mandiri (KMM). Pemanfaatan kelautan atau perikanan, khususnya di Palu Utara dan Palu Barat diupayakan membentuk kelompok-kelompok kecil usaha nelayan yang cepat berkembang melalui Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Fakir Miskin (KUBE FM) dan KUBE Keluarga Muda Mandiri (KMM).

Sedangkan sektor sumber daya manusia atau jasa, masih memerlukan pembinaan yang berkaitan dengan karakter, sifat dan latar belakang budaya yang masih kuat dan mempengaruhi etos kerja. Secara teknis operasional lebih ditingkatkan pada usaha keterampilan yang didampingi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang masih ada di tingkat desa atau kelurahan. Sektor jasa yang memungkinkan untuk dikembangkan yaitu keterampilan pertukangan dan perbengkelan. Namun yang menjadi kendala saat ini dalam menetapkan tempat usaha yang memadai.

Berbagai upaya yang dilakukan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan pemuda, serta organisasi sosial binaan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Hanya saja terdapat keterbatasan seperti penggalangan dana dan cara kerja yang belum banyak dimengerti sasaran binaan. Penggunaan dana, bagi

pemerintah dengan bantuan atau pinjaman bergilir. Namun bagi upaya organisasi masih mengandalkan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya yang masih menerapkan sistem pinjaman yang bersifat umum. Kebiasaan tersebut ada yang memberatkan kelompok sasaran, ada juga yang menguntungkan terutama mereka yang sudah terbiasa dengan pinjaman bank atau koperasi.

Sebenarnya berbagai instansi pemerintah sudah memasukkan program yang menanggulangi permasalahan masyarakat. Khususnya penanggulangan kemiskinan yang seluruhnya untuk meningkatkan penghasilan dan taraf kehidupan masyarakat setempat. Seperti Kantor Departemen Agama Kota Palu menempatkan tenaga muda sebagai Penyuluh Agama Honorer (PAH) yang dapat mengajar di sekolah agama dan sekolah umum, memberi penyuluhan dan bimbingan agama di tengah masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Palu menempatkan guru bantu pada Sekolah Dasar yang mengalami kekurangan guru; mereka tamatan perguruan tinggi yang menyandang gelar Diploma atau Sarjana Pendidikan dan belum bekerja atau sambil menunggu pengangkatan menjadi guru tetap.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Palu secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga berencana. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palu melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan anak terlantar dan lanjut usia, bantuan bagi fakir miskin dan kelompok usaha. Dinas Pertanian dengan program peningkatan

tanaman pangan jangka pendek seperti palawija dan tanaman lainnya.

Dinas Koperasi Kota Palu memberi bantuan dan pembinaan terhadap koperasi yang sudah ada. Dinas Kehutanan Kota Palu juga memberi bantuan dalam pembinaan masyarakat peduli kehutanan dengan menanam tanaman berjangka panjang dan bimbingan penghijauan di daerah yang tandus.

Penanganan yang dilakukan Organisasi Sosial/Lembaga Sosial Masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu organisasi yang dibentuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Organisasi sosial bentukan pemerintah atau instansi tertentu yang pernah membentuknya dengan nama yang khas menunjukkan instansinya. Organisasi tersebut biasanya berada di tingkat desa atau kelurahan seperti Karang Taruna (KT), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani, Kelompok Belajar, Remaja Islam Masjid (Risma) dan sebagainya.

Kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut biasanya berkaitan dengan kegiatan atau proyek dari masing-masing instansi pemerintah. Namun ada juga yang saling mendukung program pemerintah. Tiap kegiatan sasarannya ada yang sama dan ada yang berbeda. Namun secara umum sasaran garapan organisasi sosial tersebut masyarakat setempat. Oleh karena itu gerakan organisasi sosial semacam ini berkaitan dengan kegiatan

pemerintah. Sebagian organisasi sosial mengembangkan usaha berupa simpan pinjam melalui pengajian dan kelompok PKK di tingkat desa atau kelurahan setempat. Bahkan dalam kelompok yang lebih kecil lagi berupa pengajian pemuda, kaum ibu dan kaum bapak yang masing-masing membuat aturan tersendiri.

Sedangkan LSM yang dibentuk atau didirikan sekelompok orang yang peduli untuk membina masyarakat dengan tujuan tertentu. Lembaga tersebut ada yang merupakan cabang yang lebih tinggi berupa tingkat nasional atau lembaga yang sudah lama melakukan kegiatan secara khusus. Lembaga masyarakat tersebut kebanyakan berdasarkan keperluan untuk penyebaran agama tertentu.

Kalaupun ada LSM yang berkantor di Kota Palu, namun daerah kegiatannya di kabupaten lain. Sedikit LSM yang melakukan kegiatan terhadap masyarakat sekitar Kota Palu. Kegiatan yang dilakukan terbatas pada pelatihan dan bantuan teknis untuk kegiatan biasa seperti pembuatan kue, pembuatan kecap, pembuatan batu bata dan batako. Pengalaman lapangan menunjukkan keadaan tersebut dilatarbelakangi kondisi masyarakat Kota Palu yang dianggap cukup maju dan mendapatkan berbagai kemudahan bagi masyarakatnya untuk berusaha atau melakukan kegiatan tertentu.

Penanganan yang dilakukan masyarakat misalnya orang yang peduli secara pribadi atau kelompok yang disebut juga dunia usaha diperlukan partisipasinya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dan khususnya ikut menanggulangi fakir miskin.

Kelompok ini ditunjuk karena merupakan satu sasaran kelompok yang diharapkan kepeduliannya dalam ikut menunjang program pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan kebijaksanaannya untuk mengajak masyarakat peduli. Termasuk dunia usaha untuk membantu memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial yang selama ini dialami. Upaya pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan dunia usaha masih terbatas dan belum terlihat, sehingga diharapkan perkembangannya dalam waktu yang tidak begitu lama. Adapun upaya yang terlihat antara lain bantuan untuk membangun gedung sekolah dan jalan desa. Beberapa gedung sekolah dibangun secara swadaya dengan bantuan orang yang peduli tersebut, walaupun jumlahnya masih terbatas yaitu dalam lingkup Sekolah Dasar. Perbaikan jalan desa tetap mengikutsertakan dunia usaha, karena biasanya dana dari pemerintah sangat terbatas.

6. ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT

6.1 Sumber Daya Alam

Provinsi Sulawesi Tengah secara geografis terdapat berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan masyarakatnya. Namun sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan karena berbagai faktor yang akan menjadi bahasan. Luasnya Lahan Provinsi Sulawesi Tengah luasnya 261.956,75 Km terdiri dari lautan 193.923,75 Km (74,03 %) dan daratan

68.033 Km (25,97 %). Seluruh kabupaten dan kota mempunyai perbandingan yang sama, lebih luas lautan dibandingkan dengan daratan. Lautan yang begitu luas belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat masih mengandalkan cara kerja yang tradisional, menangkap ikan menggunakan peralatan yang sederhana seperti perahu kecil dan pancing. Lokasi mencari ikan tidak jauh dari garis pantai. Hasil yang diperoleh untuk keperluan makan harian dalam keluarga. Kalaupun ada hasil tangkapan dijual secukupnya untuk memenuhi beberapa kebutuhan makanan pokok.

Sementara bagian lautan yang luas tersebut ada yang dimanfaatkan orang lain. Misalnya penangkapan menggunakan peralatan yang modern dengan menggunakan kapal laut dan tenaga kerja yang memadai. Laut dikuasai orang lain, demikian pula hasilnya dibawa ke luar daerah Sulawesi Tengah. Bahkan untuk komoditas ekspor, khususnya untuk jenis ikan tertentu seperti ikan tongkol dan hiu. Daratan terbagi dua yaitu pegunungan dan pantai. Pegunungan dan lembah umumnya subur dan dapat ditanami berbagai jenis tanaman jangka panjang, sayuran dan palawija. Hanya pegunungan di bagian pantai yang terlihat tidak subur, namun di bagian lembahnya dapat ditanami jenis tanaman keras tertentu seperti cengkeh, kelapa dan coklat. Pemanfaatan lahan tersebut juga masih terbatas karena sistem pertanian yang dilakukan masyarakat terbatas pula seperti hanya mengandalkan tanaman tertentu, pengairan tadah hujan karena tidak ada sungai sebagai sumber air untuk tanaman. Hasil yang diperoleh menjadi terbatas baik jenis tanaman yang

diandalkan maupun dalam pendapatan yang diperoleh.

Di pegunungan atau bagian pedalaman lahannya masih murni dan dihuni oleh komunitas adat terpencil yang secara arif masih memelihara lingkungan secara alami. Demikian pula dengan kehadiran transmigran dari Pulau Jawa dan Bali yang telah mengusahakan lahan atau hutan untuk perkebunan sayuran dan palawija yang dapat diandalkan dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Walaupun demikian belum semuanya digarap sebagai lahan pertanian secara optimal karena masih mengandalkan tanaman tadah hujan. Banyak perkebunan yang luas dimiliki penduduk pendatang. Walaupun demikian penduduk setempat mengandalkan tanaman jangka panjang tersebut sebagai satu-satunya penghasilan keluarga. Kelapa dan coklat mempunyai nilai tinggi karena dipasarkan ke luar Sulawesi Tengah dan diekspor, sehingga ada sebagian petani kedua jenis tanaman tersebut menjadi orang kaya. Sebenarnya masyarakat setempat dapat mencontoh mereka yang berhasil. Namun karena masih bersandar pada kebiasaan setempat agaknya mengalami kesulitan untuk diterapkan.

Terbatasnya Jenis Mata Pencaharian. Kebanyakan masyarakat mengandalkan satu jenis mata pecaharian. Sebagai petani hanya mengandalkan hasil pertaniannya, walaupun mereka tinggal di pantai. Sebaliknya nelayan hanya mengandalkan hasil tangkapannya, walaupun mereka tinggal di lembah atau sekitar empang pasang surut.

Keadaan tersebut mereka lakukan karena hanya mengandalkan satu jenis mata pencaharian pokok dengan satu keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jarang ditemukan masyarakat setempat melakukan pekerjaan lebih dari satu kegiatan, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang terbatas tersebut. Tentunya satu jenis pekerjaan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi penghambat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Tenaga Kerja. Melihat luasnya lautan dan daratan belum dapat menampung tenaga kerja yang terserap dalam kedua jenis pekerjaan tersebut. Masyarakat setempat belum banyak yang berminat sebagai pekerja di lautan dan perkebunan. Sektor itu diisi oleh pekerja yang berasal dari luar Sulawesi Tengah seperti tenaga kerja kasar di perusahaan perikanan, perkebunan, pengolahan coklat dan kopra. Tenaga kerja yang terserap dalam mengolah sumber daya alam. Penduduk setempat mengembangkan jenis pekerjaan di sektor jasa seperti menjadi tukang, ojek dan pemulung. Sebagai tukang mengandalkan pembangunan di perkotaan berupa perumahan dan perkantoran yang dirasakan dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan peningkatan. Sebagai tukang ojek merupakan salah satu jasa yang dapat diandalkan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sebagai salah satu Pekerjaan sampingan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kegiatan memulung di sekitar Tempat Pembuangan Akhir sampah dilakukan sebagian masyarakat di sekitar

Kelurahan Kawatuna. Sudah lima tahun ini mereka melakukan kegiatan memulung. Di desa tersebut dibuka tempat pembuangan akhir sampah yang berasal dari penduduk Kota Palu. Berbagai jenis barang yang dapat dikumpulkan dan laku dijual kepada bandar barang bekas. Mereka membuka usaha di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut atau di sekitar pelabuhan. Ternyata beberapa jenis barang bekas mempunyai nilai atau harga yang cukup tinggi sebagai sumber penghasilan. Barang-barang tersebut semuanya dijual oleh pemulung kepada pengumpul yang kemudian akan dikapalkan ke Surabaya untuk diolah di pabriknya.

6.2 Sumber Daya Manusia

Budaya. Budaya masyarakat setempat yang masih bertumpu pada kepercayaan lama menyebabkan masyarakat mengalami keterlambatan. Sebagaimana diketahui prinsip dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu hari ini untuk hari ini, hari esok tergantung hari esok atau cari esok. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dalam merubah sikap, sehingga untuk lebih maju memerlukan waktu.

Terbatasnya Pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah ditandai dengan angka putus sekolah yang dialami masyarakat dari seluruh tingkatan pendidikan. Angka putus sekolah tercatat 81 orang terdiri dari; 33 murid SD, 25 murid SLTP, 16 murid SLTA dan tujuh mahasiswa. Meskipun relatif rendah, seharusnya tingkat pendidikan di perkotaan akan lebih tinggi karena ditunjang berbagai sarana pendidikan. Sarana yang tersedia dianggap cukup membantu masyarakat

setempat untuk mengikuti pendidikan secara menyeluruh ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak berlanjutnya pendidikan yang lebih tinggi tersebut lebih disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung, mereka termasuk golongan yang tidak mampu. Kondisi tersebut dilihat dari pendapatan masing-masing keluarga yang kebanyakan terdiri dari petani. Terbatasnya pendidikan yang dialami masyarakat setempat menyebabkan terhambatnya pendidikan generasi muda. Pendidikan formal yang diikuti masyarakat sangat terbatas, sehingga memunculkan angka putus sekolah yang cukup tinggi.

6.3 Sumber Daya Sosial

Sumber daya sosial berupa kelembagaan sosial atau organisasi sosial tingkat lokal atau yang berada di lingkungan setempat dapat dikelompokkan dalam tiga lembaga yaitu lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial. Tiap lembaga tersebut mempunyai fungsi masing-masing dalam masyarakat, namun sasarannya tetap satu yaitu masyarakat setempat. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berorganisasi. Sangat banyak dan bervariasinya lembaga tersebut belum dikembangkan untuk memenuhi keperluan masyarakat.

Beberapa faktor yang mem-pengaruhi kurang berkembangnya masyarakat karena hampir semua tokoh masyarakat menjadi pimpinan lembaga tertentu. Tokoh masyarakat setempat sebagai tokoh yang berpengaruh, sehingga sangat dimungkinkan dapat memimpin masyarakatnya dalam suatu lembaga.

Diangkatnya tokoh masyarakat menyebabkan mereka mendapat tambahan beban yang baru. Sebab ada kemungkinan seorang ketua Rukun Tetangga merangkap sebagai Ketua Lembaga Agama. Jabatan rangkap dalam lembaga masyarakat merupakan hal yang biasa. Akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaan kegiatan mengalami tumpang tindih untuk melakukan kegiatan yang hampir sama. Sebaliknya memang ada jabatan yang tidak dirangkap, namun pemangku tugasnya yang belum berpengalaman, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan secara baik.

Namun jika dilihat dari aspek ekonomi, tokoh masyarakat yang ada kebanyakan berada dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah. Di satu pihak mereka tetap menjalankan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan jenisnya dan di lain pihak harus mengurus masyarakatnya. Sementara kegiatan dalam memimpin lembaga lebih dituntut kreativitas dan sukarela dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan. Sebagai contoh menjalankan suatu lembaga, semua pengurus dan anggota harus menyisihkan sejumlah uang untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan lembaga tersebut.

7. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Simpulan

- a. Pemanfaatan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal yang berpengaruh pada penghasilan tiap orang untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Kebanyakan masyarakat setempat masih mengandalkan pada mata pencaharian pokok. Hasilnya hanya untuk keperluan keluarga dan belum dapat memenuhi kebutuhan lain.

- b. Kaitannya dengan sumber mata pencaharian hidup yang terbatas menyebabkan banyak anak-anak usia sekolah mengalami putus sekolah. Derajat kesehatan yang relatif masih rendah dan masalah sosial lainnya muncul seperti terjadinya anak terlantar.
- c. Sumber daya sosial yang cukup banyak, namun dalam penanganan masalah sosial masih rendah.

7.2 Rekomendasi

- a. Tokoh masyarakat dan masyarakat perlu digerakkan dalam memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya. Meskipun tanah tandus ada beberapa hasil alam seperti batu dan pasir dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan masyarakat. Masyarakat mulai memikirkan dan mengembangkan pekerjaan tambahan yang sesuai dengan keahliannya.
- b. Perlu gerakan membangun masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pemerintah terus menerus memotivasi dan melakukan bimbingan dibantu organisasi sosial dan masyarakat peduli.

PUSTAKA ACUAN

- Allen Pincus and Anne Minahan, (1973). *Social Work Practice: Model and Method*. Illionis; F.E. Peacock Publisher Inc.

- Anonim, (2002a). *Kecamatan Palu Selatan Dalam Angka 2002*, Palu: BPS dengan Bappeda Kota Palu.
- _____, (2002b). *Kota Palu Dalam Angka 2002*. Palu: BPS Kota Palu.
- _____, (2003a). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Palu; Dinkesos Provinsi Sulawesi Tengah.
- _____, (2003b). *Statistik Potensi Desa Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu; BPS Sulawesi Tengah.
- _____, (2003c). *Profil Kemiskinan Di Indonesia*, Jakarta; Pusdatin Kesos.
- _____, (2004). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Palu; Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
- Idris, Burhanuddin, (1998). *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Inpres Desa Tertinggal di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, Kabupaten Dati II Donggala*. Palu; FISIP UT.
- Koentjaraningrat, (1990). *Pengantar Antropologi* (Jilid 1, Cetakan ke-8). Jakarta; Rineka Cipta.
- Mujirin, dkk, (1994). *Studi Kemiskinan Terhadap Penduduk Kampung Watusela di Kota Administratif Palu*. Palu; BPUT.
- Nawawi, M, dkk, (2001). *Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Studi tentang Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Kemasyarakatan*. Palu; FISIP UT.
- Paul B. Horton and Chester L. Hunt, (1987). *Sociologi*, Eight Edition, (Terjemahan: Aminuddin Ram dan Tita Sobari). Jakarta; Erlangga.
- Rusli, Said (ed), (1995). *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*. Jakarta; Grasindo.
- Soulisa, Awat, dkk, (1996). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Kasus Program Pengembangan Wilayah di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah*. Palu: LP UT.
- Supriatna, Tjahya, (1997). *Birokrasi Perkembangan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung; HUP.
-
- Achmadi Jayaputra. Ahli Peneliti Muda bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI.